

# Dampak Reformasi Birokrasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Jawa Barat

Pupung Puad Hasan  
Henri Prianto Sinurat

## Executive Summary

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan berhasil meningkatkan indeks reformasi birokrasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan target penurunan kemiskinan melalui program-program reformasi birokrasi. Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat, target penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 adalah 7,88% dan 7,68% pada tahun 2024. Namun, data BPS menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan persentase kemiskinan tercatat sebesar 7,62% pada tahun 2023 dan 7,46% pada tahun 2024, masing-masing lebih baik dari target yang ditetapkan. Namun berdasarkan pengukuran statistik, implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat belum mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu ketidakkonsistenan implementasi, ketidaksinambungan kebijakan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kelemahan dalam pengawasan dan evaluasi yang menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan. Policy brief ini menyajikan alternatif rekomendasi dalam meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem monitoring yang ketat untuk memantau implementasi secara real-time, bahkan saat terjadi perubahan kepemimpinan. Pembentukan tim lintas lembaga dengan mandat yang jelas dan penggunaan platform digital untuk berbagi data akan membantu menyelaraskan kebijakan antar lembaga. Penyusunan roadmap kebijakan yang terintegrasi dan fokus jangka panjang, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi dan transparansi hasil evaluasi, akan memperkuat efektivitas program sesuai kebutuhan di lapangan.



## Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang menjadi perhatian di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya sebatas pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga Maret 2023 tingkat kemiskinan secara nasional mencapai 9,3%. Data kemiskinan berdasarkan tempat tinggal dapat dikelompokkan sebagaimana berikut ini:

Tipe Daerah	Presentase Penduduk Miskin
Perkotaan	7,19%
Perdesaan	9,30%

Sumber: BPS 2024, Kemiskinan di Indonesia

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia antara lain ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan perubahan iklim. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, memiliki jumlah penduduk sekitar 49,9 juta jiwa, atau 17,78% dari total populasi nasional. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, Jawa Barat juga menghadapi tantangan kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2023 mencapai 9,42%. Provinsi ini terdiri dari 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin sebagaimana pada tabel disamping.

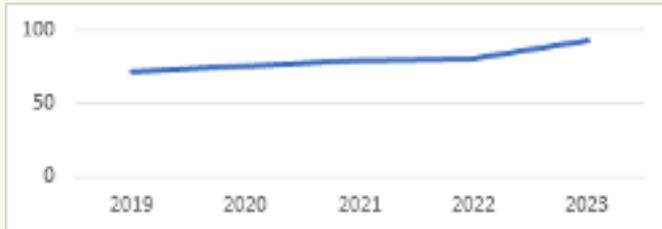
Hasil evaluasi pembangunan daerah hingga tahun 2022 menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Jawa Barat pada tahun 2024, yaitu 1) Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial, dan keamanan; 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur; 4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan; 5) Kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan 6) Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.



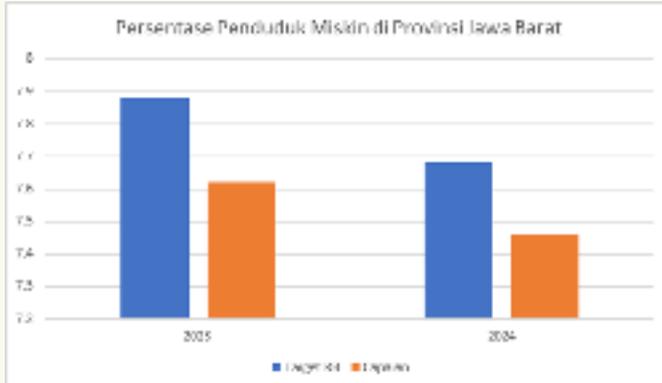
Daerah	2022	2023	2024
Bogor	474.7	453.8	446.8
Sukabumi	186.3	178.7	175.9
Cianjur	246.8	240.1	239.3
Bandung	258.6	245.5	239.9
Garut	276.7	260.5	259.3
Tasikmalaya	194.1	186.9	186.8
Ciamis	94.0	90.8	90.8
Kuningan	140.3	133.9	131.8
Cirebon	266.1	249.2	245.9
Majalengka	147.1	138.7	134.6
Sumedang	120.1	111.4	108.9
Indramayu	225.0	214.7	212.1
Subang	155.3	152.3	152.6
Purwakarta	83.4	81.5	81.4
Karawang	199.9	187.2	187.8
Bekasi	201.1	204.1	204.5
Bandung Barat	183.7	179.4	179.7
Pangandaran	37.9	36.7	36.0
Kota Bogor	79.2	75.0	73.9
Kota Sukabumi	26.6	25.0	24.1
Kota Bandung	109.8	102.8	101.1
Kota Cirebon	31.5	29.5	29.2
Kota Bekasi	137.4	129.4	128.8
Kota Depok	64.4	62.0	62.6
Kota Cimahi	31.2	28.6	27.0
Kota Tasikmalaya	87.1	79.4	76.7
Kota Banjar	12.7	11.7	11.2

(dalam ribu jiwa)

Gambar 1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat



Berdasarkan Gambar 1, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sejak tahun 2019, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 93,08, dibandingkan 80,7 pada tahun 2022. Prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan bagi Provinsi Jawa Barat.



Provinsi Jawa Barat telah menetapkan isu pengentasan kemiskinan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023- 2026. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 diharapkan persentase penduduk miskin menurun menjadi 7,88%, dan lebih lanjut menurun menjadi 7,68% pada tahun 2024. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, realisasi persentase penduduk miskin menunjukkan hasil yang lebih baik dari target. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,62%, yang berarti lebih baik 0,26% dari target yang ditetapkan. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dimana persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,46%, lebih baik 0,22% dari target 7,68%.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan dampak positif terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Meskipun reformasi birokrasi memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen pemerintah, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

## Analisis Masalah

Pemerintah telah mendorong pengentasan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk mengukur dampak reformasi birokrasi terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Barat, dilakukan analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun reformasi birokrasi memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan, namun tidak besar hal ini ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Pengukuran	Hasil
Jumlah sampel	27 kabupaten kota di Jawa Barat
Tahun pengukuran	2021-2023
R	0,223
R Square	0,050
Durbin watson	1,490
F	4,153
Sig	0,045

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dampak reformasi birokrasi terhadap pengentasan kemiskinan sangat kecil, hanya sebesar 5%. Meskipun reformasi birokrasi memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, dampak yang dihasilkan seringkali tidak sebesar yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Implementasi yang tidak konsisten, perubahan kepemimpinan atau pergantian kebijakan dapat menghambat keberlanjutan (kontinuitas) program pengentasan kemiskinan.
2. Ketidaksinambungan kebijakan, ketidaksinambungan kebijakan menyebabkan fokus penanganan kemiskinan menjadi tidak jelas
3. Kurangnya koordinasi antar lembaga, lembaga pemerintah yang berbeda-beda seringkali bekerja secara terpisah (silo), sehingga program-program yang berjalan tidak terintegrasi dengan baik.
4. Kelemahan dalam pengawasan dan evaluasi, tanpa evaluasi yang cermat, sulit untuk mengetahui efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

## Rekomendasi Kebijakan

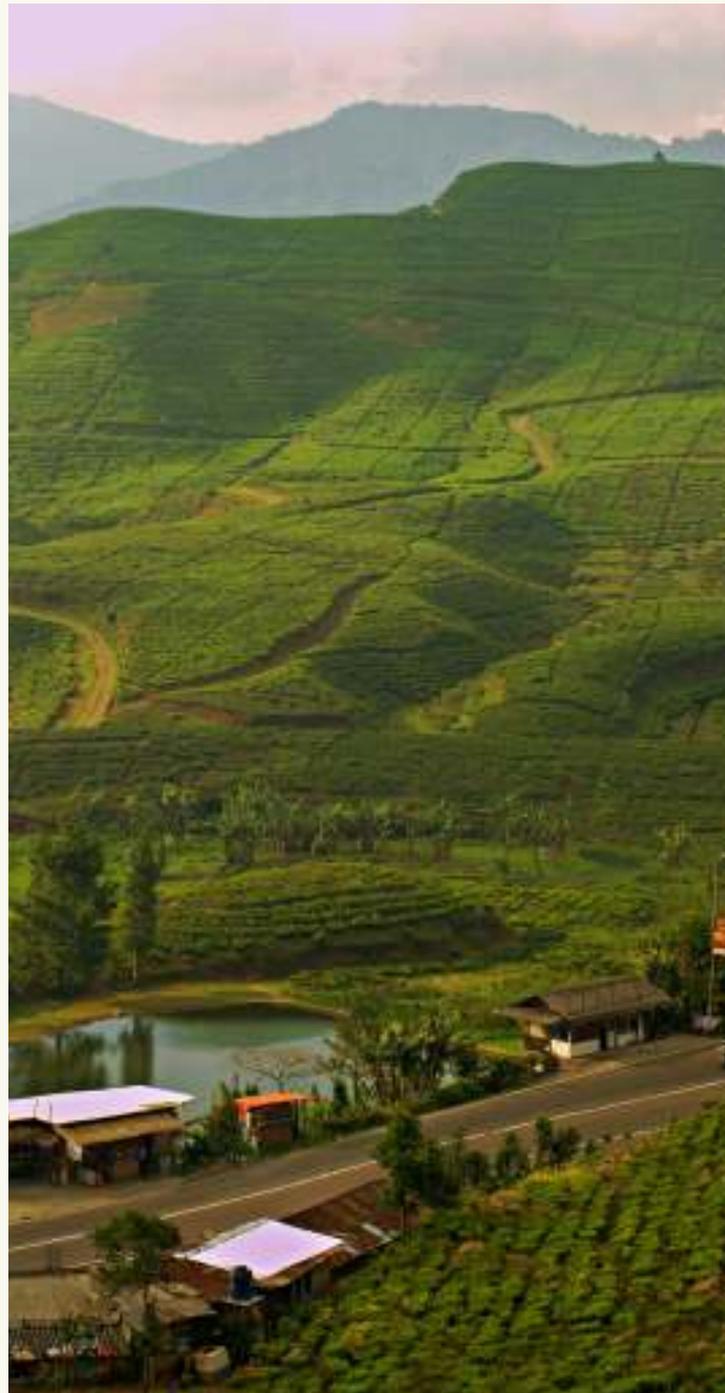
Dari permasalahan tersebut, rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan dampak reformasi birokrasi terhadap pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Konsistensi Implementasi: Meminimalkan gangguan dalam program pengentasan kemiskinan dengan menjaga kesinambungan kebijakan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.
2. Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga: Mendorong integrasi antar lembaga pemerintah untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan sinergis dan efektif.
3. Meningkatkan Sinergi Kebijakan: Mengembangkan kebijakan yang berkesinambungan dan terfokus pada tujuan jangka panjang pengentasan kemiskinan.
4. Memperkuat Pengawasan dan Evaluasi: Meningkatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, serta melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

## Strategi Implementasi

Untuk mendukung implemetasi rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan dampak reformasi birorkasi terhadap pengentasan kemiskinan, strategi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Penerapan sistem monitoring yang ketat. Hal ini dapat digunakan untuk memantau implementasi program secara real-time, sehingga kebijakan tetap berjalan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.
2. Membentuk tim lintas lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan, dengan mandat yang jelas untuk menyelaraskan program dan kebijakan antar lembaga.
3. Mengembangkan platform digital sebagai sarana berbagi data dan informasi antar lembaga, sehingga semua pihak dapat bekerja dengan menggunakan informasi yang sama.
4. Menyusun roadmap kebijakan yang terintegrasi dan memiliki fokus jangka panjang pada pengentasan kemiskinan, dengan target dan indikator kinerja yang jelas. Integrasi program juga mencakup pada proyek perubahan yang diselenggarakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik dan terlibat dalam evaluasi program. Laporan hasil evaluasi program pengentasan kemiskinan perlu dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi. Sehingga kebijakan dapat diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan



## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik 2024, Kemiskinan di Indonesia.  
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023- 2026.  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

# POLICY BRIEF

*Dampak Refomasi Birokrasi Terhadap Pengentasan  
Kemiskinan di Jawa Barat*



## LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSLATBANG PKASN

Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat



Untuk informasi lebih lanjut :

**0857-2353-2423**



[www.bandung.lan.go.id](http://www.bandung.lan.go.id)



[puslatbangpkasn\\_lan](https://www.instagram.com/puslatbangpkasn_lan)



[puslatbang PKASN LAN](https://www.facebook.com/puslatbangpkasnlan)